



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

di Lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet
Tahun 2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 *juncto*. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sebagaimana diketahui, Sekretariat Kabinet pada tanggal 29 Maret 2016 telah mencanangkan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Sekretariat Kabinet yang dilakukan oleh seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet, diwakili oleh Sekretaris Kabinet dan disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Ombudsman, dan Deputy Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pencanaan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembangunan unit kerja ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Sekretariat Kabinet pada tanggal 15 Agustus 2017, yaitu dengan menetapkan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebagai unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet untuk diusulkan menuju WBK/WBBM. Pada tahun 2018, Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet melaksanakan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM, namun belum memiliki kesempatan untuk untuk bisa ditetapkan sebagai WBK/WBBM.

Sehingga pada Juni s.d Juli 2020, Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet melaksanakan pembangunan kembali dibuktikan dengan telah dilakukannya langkah-langkah kegiatan dalam rangka pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet, antara lain dengan membentuk Tim Kerja melalui Keputusan Deputy Bidang Administrasi tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2020, serta menerapkan program-program dalam Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet, meliputi: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet merupakan sebuah aktivitas nyata yang pelaksanaannya difokuskan pada penerapan program-program dalam Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi yang bersifat konkret sebagaimana disebutkan di atas. Selain itu, pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet juga merupakan bentuk komitmen Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet untuk senantiasa melaksanakan program Reformasi Birokrasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Kami menghargai semua masukan dan saran terkait pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Akhir kata, semoga Laporan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet ini akan memberikan gambaran tentang proses pelaksanaan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet secara utuh dan sebagai pelaksanaan dari program Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Jakarta, Juni 2020
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet,



Thanon Aria Dewangga

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.2.1 Maksud.....	2
1.2.2 Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum.....	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
Bab II Pelaksanaan (Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM)	
2.1 Penetapan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebagai Unit Kerja Menuju WBK/WBBM.....	4
2.2 Pembangunan WBK/WBBM di Lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.....	5
2.2.1 Pembentukan Tim Kerja dan Struktur Organisasi.....	7
2.2.2 Penyusunan Rencana, Jadwal Kerja, dan Anggaran, serta Penyusunan dan Penetapan Metode Monitoring dan Evaluas.....	8
2.2.3 Penerapan Program-program dalam Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi.....	10
Bab III Penutup	
3.1 Kesimpulan.....	25
3.2 Saran.....	26
Lampiran Dokumen Pendukung	

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1. Tahap Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Sekretariat Kabinet tahun 2018	7
Tabel 2. Tahap Implementasi dan Monitoring serta Evaluasi dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Deputi Dukungan Kerja Kabinet tahun 2018	10
Tabel 3. <i>Timeline</i> Penerapan Program Manajemen Perubahan	12
Tabel 4. <i>Timeline</i> Penerapan Program Penataan Tata Laksana	14
Tabel 5. <i>Timeline</i> Penerapan Program Penataan Sistem Manajemen SDM.....	15
Tabel 6. <i>Timeline</i> Penerapan Program Penguatan Akuntabilitas.....	18
Tabel 7. <i>Timeline</i> Penerapan Program Penguatan Pengawasan.....	20
Tabel 8. <i>Timeline</i> Penerapan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanggal 29 Maret 2016 merupakan tonggak sejarah bagi Sekretariat Kabinet, karena pada tanggal tersebut di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta telah dilakukan pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dalam pencanangan tersebut, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas antara Sekretaris Kabinet bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Ombudsman, dan Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. (*Memorandum Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi No.: M.158/Adm-3/3/2016 tanggal 21 Maret 2016*).



Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Kabinet sangat penting dan mendesak dilakukan karena beberapa hal. *Pertama*, sesuai amanat Sekretaris Kabinet intinya bahwa korupsi itu diibaratkan seperti narkoba di mana pemakai/penikmatnya apabila ketahuan akan malu tetapi akan ketagihan terus. Korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja, bukan hanya orang yang kekurangan, karena banyak di antara mereka yang sesungguhnya memiliki mobil banyak dan rumah yang mewah. Oleh karena itu, para pejabat pemerintahan sejak awal harus menjauhkan diri dari kemungkinan terjadinya korupsi. *Kedua*, melalui pembangunan zona integritas di lingkungan Sekretariat Kabinet diharapkan Sekretariat Kabinet mampu menumbuhkan budaya kerja

birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang fokus pada pelayanan publik melalui pembangunan unit kerja percontohan di lingkungan Sekretariat Kabinet. *Ketiga*, program reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet sebenarnya telah lama dilaksanakan, hal tersebut ditandai dengan kegiatan-kegiatan dalam ranah zona integritas dalam hal perubahan pola pikir, budaya kerja, dan disiplin pegawai, penataan organisasi, tata laksana, pengelolaan SDM yang transparan, pengisian jabatan secara terbuka, lelang pengadaan barang dan jasa melalui *online system*, penguatan akuntabilitas dan pengawasan internal, serta peningkatan pelayanan publik. Selain itu, dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan, Sekretariat Kabinet telah tujuh kali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sejak tahun 2012 hingga 2018.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu adanya tindak lanjut dari penancangan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Sekretariat Kabinet tersebut yakni dengan melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Sekretariat Kabinet, yaitu dengan menetapkan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebagai *pilot project* Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Sekretariat Kabinet.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap proses pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet secara utuh dan sebagai pelaksanaan dari program reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

1.2.2 Tujuan

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Sekretariat Kabinet adalah untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi;
- b. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan
- c. Meningkatkan pelayanan publik.

1.3 Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi.
2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet.
3. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 *juncto*. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
5. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.
6. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 13 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2015-2019.
7. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019.

1.4 Sistematika Penyusunan

Bab I Pendahuluan.

Menguraikan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, dan sistematika penulisan.

Bab II Pelaksanaan.

Menjelaskan mengenai pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 *juncto*. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Bab ini berisi tahapan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, mulai dari penancangan sampai dengan pembangunan, yakni menetapkan dan membangun Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebagai unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet untuk diusulkan menuju WBK/WBBM.

Bab III Penutup.

Menguraikan mengenai kesimpulan, saran dan masukan untuk ditindaklanjuti dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

BAB II

PELAKSANAAN

(PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM)

2.1. Penetapan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebagai Unit Kerja Menuju WBK/WBBM.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Sekretariat Kabinet merupakan tindak lanjut dari pencaanangan yang telah dilakukan oleh seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet, yang diwakili Sekretaris Kabinet dan disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Ombudsman, dan Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, pada tanggal 29 Maret 2016 di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta.

Proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Sekretariat Kabinet difokuskan pada penerapan program-program dalam Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkret, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 *juncto*. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Permenpan-RB No.10/2019 *jo*. Permenpan-RB No.52/2014).

Dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM, pada tanggal 19 Februari 2020 Sekretariat Kabinet *cq.* Deputi Bidang Administrasi telah menetapkan kembali satu unit kerja setingkat eselon I yang diusulkan sebagai WBK/WBBM yakni Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Penetapan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebagai calon WBK/WBBM tersebut dengan memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam Permenpan-RB No.10/2019 *jo*. Permenpan-RB No.52/2014, diantaranya:

- a. Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam memberikan pelayanan publik dan telah memiliki standar pelayanan.
 - Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet melaksanakan pengelolaan sidang kabinet, rapat terbatas maupun pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan dihadiri Wakil Presiden serta para Menteri/Pejabat dan Kepala Daerah.
 - Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet menyampaikan risalah yang berisi arahan Presiden hasil sidang kabinet kepada para Menteri/Pejabat peserta sidang kabinet atau rapat terbatas serta pejabat eselon I Kementerian dan Lembaga guna dijadikan sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah.
 - Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet melaksanakan pembinaan bagi pejabat fungsional penerjemah yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah.

- Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet melaksanakan penyebarluasan informasi hasil peliputan sidang kabinet atau rapat terbatas dan kegiatan Presiden lainnya yang dapat diunggah di website www.setkab.go.id.
 - Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet memiliki 3 (tiga) standar pelayanan yang telah dimaklumkan dalam mendukung pemberian pelayanan kepada publik yaitu Standar Pelayanan Permohonan Penjadwalan Sidang Kabinet maupun Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden Standar Pelayanan Permohonan Salinan Risalah Sidang Kabinet maupun Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan Standar Pelayanan Permohonan Informasi Hasil Peliputan Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet.
 - Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet menjadi lokus Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2019 dan telah dievaluasi Kementerian PANRB dengan Indeks Pelayanan Publik sebesar 4.16 (kategori A-/Sangat Baik).
- b. Mengelola sumber daya yang cukup besar.
- Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet didukung sumber daya manusia sebanyak 122 orang yang terdiri dari 104 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 18 Pegawai Tidak Tetap (PTT).
 - Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet mengelola anggaran sebesar Rp 21.565.780.000 pada tahun 2019 dengan capaian sebesar 97,85 persen.
- c. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.
- Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet memperoleh nilai indeks kualitas pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2017 sebesar 3,50 (skala maksimal 4) dan hasil survei eksternal tahun 2017 terkait indeks persepsi anti korupsi mencapai nilai 3,59.

2.2 Pembangunan WBK/WBBM di Lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Tahap persiapan merupakan tahap persiapan kapabilitas implementasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dan penyusunan metode *monitoring* dan evaluasi implementasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet pelaksanaannya difokuskan pada penerapan program-program Reformasi Birokrasi dalam komponen pengungkit yang bersifat konkret, meliputi:

1. Program Manajemen Perubahan:
 - a. Pembentukan Tim Kerja.

- b. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 - c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 - d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.
2. Program Penataan Tata Laksana:
 - a. Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama.
 - b. *E-Office*
 - c. Keterbukaan Informasi Publik.
3. Program Penataan Sistem Manajemen SDM:
 - a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi.
 - b. Pola Mutasi Internal.
 - c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi.
 - d. Penetapan Kinerja Individu.
 - e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai.
 - f. Sistem Informasi Kepegawaian.
4. Program Penguatan Akuntabilitas:
 - a. Keterlibatan Pimpinan.
 - b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja.
5. Program Penguatan Pengawasan:
 - a. Pengendalian Gratifikasi.
 - b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP).
 - c. Pengaduan Masyarakat.
 - d. *Whistle Blowing System*.
 - e. Penanganan Benturan Kepentingan.
 - f. Kelengkapan Pelaporan LHKPN dan LHKASN
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
 - a. Standar Pelayanan.
 - b. Budaya Pelayanan Prima.
 - c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan.

Tahap persiapan untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet, sebagaimana tabel berikut telah mulai dilakukan pada 2 Juni 2020.

Tabel 1.
Tahap Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM di Lingkungan Sekretariat Kabinet

Langkah	Aktivitas	Keluaran
1	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Kerja; - Pembentukan Struktur/Organisasi Kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Kerja; - Struktur/Organisasi Kerja.
2	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana dan Jadwal Kerja serta Target Penyelesaian; - Penyusunan Anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana dan Jadwal Kerja; - Target Penyelesaian; - Anggaran.
3	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan Menetapkan Metode <i>Monitoring</i> dan Evaluasi. - Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Sekretariat Kabinet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Metode <i>Monitoring</i> dan Evaluasi; - Rancangan Laporan.

Tahap Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, terdiri dari 2 (dua) kegiatan utama, yaitu: Pembentukan Tim Kerja dan Struktur/Organisasi dan Penyusunan Rencana, Jadwal Kerja, dan Anggaran, serta Penyusunan; dan Penetapan Metode *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

2.2.1 Pembentukan Tim Kerja dan Struktur/Organisasi.

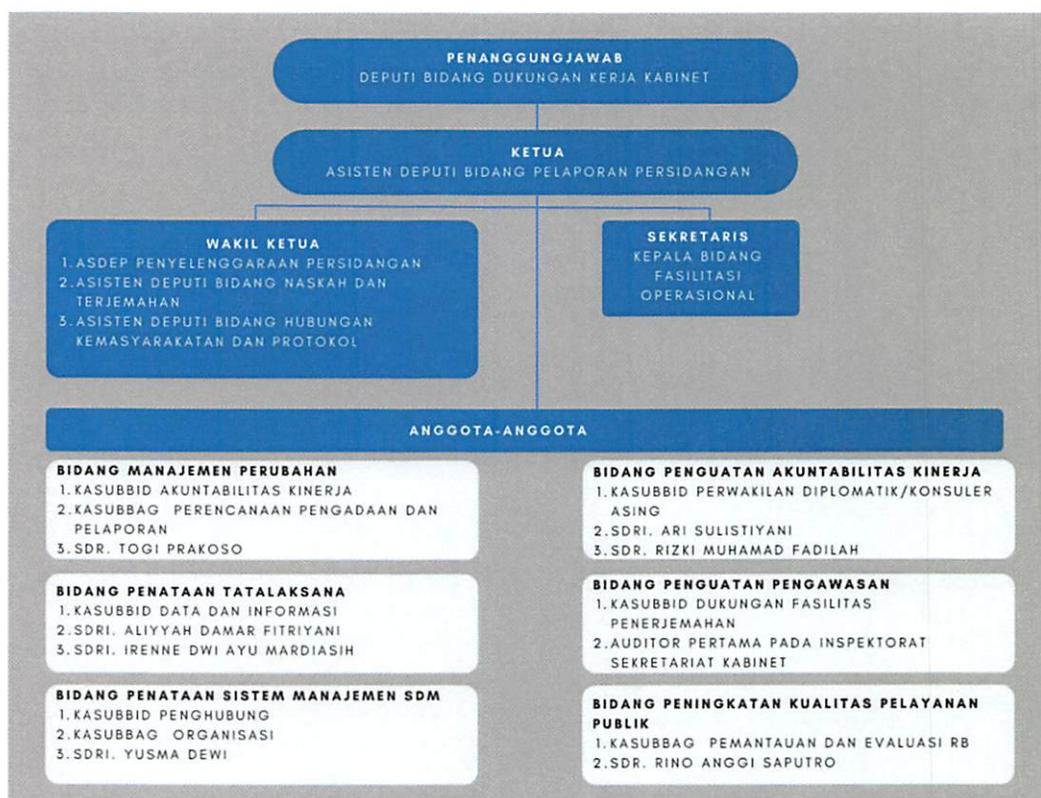
Pembentukan Tim kerja ditetapkan melalui Keputusan Deputi Bidang Administrasi tentang Tim kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2020.

Pemilihan anggota Tim Kerja **mempertimbangkan keterwakilan dari unsur-unsur penganggaran, aspek hukum, pengawasan, dan pelaporan.** Anggota yang dipilih adalah pegawai dan pejabat yang memiliki tugas dalam pelaksanaan SAKIP, RB, Program dan Anggaran serta narahubung unit kerja untuk membantu pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, dengan mendayagunakan kemampuan serta mengerahkan seluruh sumberdaya yang dimilikinya. Anggota Tim Kerja dikendalikan secara langsung oleh Ketua Tim Kerja

(Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan) untuk membantu pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Struktur/Organisasi Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Deputi Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2020, terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

Bagan struktur/organisasi Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Deputi Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2020, adalah sebagai berikut.



2.2.2 Penyusunan Rencana, Jadwal Kerja, dan Anggaran, serta Penyusunan dan Penetapan Metode Monitoring dan Evaluasi.

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Deputi Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2020 mengawali tugasnya dengan menyelenggarakan rapat guna menindaklanjuti pengusulan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebagai calon unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM tahun 2020. Rapat tersebut membahas langkah-langkah yang harus dilakukan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam persiapan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM (*Memorandum Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan selaku Ketua Tim Nomor: M.646/DKK-2/05/2020 tanggal 29 Mei 2020*), yaitu:

- a. Pembentukan tim kerja melalui Keputusan Deputi Bidang Administrasi tentang Tim kerja Pembangunan Zona Integritas

- Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2020.
- b. Penyusunan Rencana dan Jadwal Kerja serta Target Penyelesaian;
 - c. Penyusunan Anggaran Kegiatan;
 - d. Penyusunan dan Penetapan Metode *Monitoring* dan Evaluasi serta Mekanisme Pelaporan.
 - e. Pembagian tugas tim dalam pemenuhan data dukung pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada setiap komponen pengungkit.
 - f. Melakukan pengawalan pada Tim Penilai Internal dalam kelengkapan data dukung komponen hasil.

Hasil rapat juga menyepakati dan menetapkan Strategi dan Rencana Aksi Program Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Deputi Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2020 yang difokuskan pada penerapan Program-program dalam Komponen Pengungkit yang bersifat konkret, meliputi:

- a. Program Manajemen Perubahan:
 - 1) Pembentukan Tim Kerja.
 - 2) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 - 3) Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 - 4) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.
- b. Program Penataan Tata Laksana:
 - 1) Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama.
 - 2) *E-Office*
 - 3) Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Program Penataan Sistem Manajemen SDM:
 - 1) Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi.
 - 2) Pola Mutasi Internal.
 - 3) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi.
 - 4) Penetapan Kinerja Individu.
 - 5) Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai.
 - 6) Sistem Informasi Kepegawaian.
- d. Program Penguatan Akuntabilitas:
 - 1) Keterlibatan Pimpinan.
 - 2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja.
- e. Program Penguatan Pengawasan:
 - 1) Pengendalian Gratifikasi.
 - 2) Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP).
 - 3) Pengaduan Masyarakat.
 - 4) *Whistle Blowing System*.
 - 5) Penanganan Benturan Kepentingan.
 - 6) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai.

f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

- 1) Standar Pelayanan.
- 2) Budaya Pelayanan Prima.
- 3) Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan.

Tim Kerja juga menyepakati Metode *Monitoring* dan Evaluasi, serta Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Intergitas Menuju WBK/WBBM pada Deputi Dukungan Kerja Kabinet tahun 2020 yang telah disusun sebagai pedoman dalam *me-monitor* dan mengevaluasi serta melaporkan hasil pembangunan zona intergitas menuju WBK/WBBM.

2.2.3 Penerapan Program-program dalam Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi.

Penerapan Program-program dalam Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi merupakan tahap implementasi dan *monitoring* serta evaluasi dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Zona Intergitas Menuju WBK/WBBM pada Deputi Dukungan Kerja Kabinet tahun 2020, sebagaimana digambarkan tabel berikut.

Tabel 2.

Tahap Implementasi dan *Monitoring* serta Evaluasi dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Zona Intergitas Menuju WBK/WBBM pada Deputi Dukungan Kerja Kabinet tahun 2020

Langkah	Aktivitas	Keluaran
1	<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan Aktivitas sesuai dengan Rencana dan Jadwal Kerja;- Penyelesaian Program-program dalam Komponen Pengungkit sesuai Target dalam Jadwal Kerja.	<ul style="list-style-type: none">- Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pembangunan Zona Intergitas Menuju WBK/WBBM secara berkala;- Penyelesaian Program-program dalam Komponen Pengungkit.
2	Pelaksanaan Pembangunan Zona Intergitas Menuju WBK/WBBM.	<ul style="list-style-type: none">- Hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi;- Usulan dan rekomendasi perbaikan.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet pelaksanaannya difokuskan pada penerapan program-program dalam komponen pengungkit yang bersifat konkret, meliputi: Program Manajemen Perubahan, Program Penataan Tata Laksana, Program

Penataan Sistem Manajemen SDM, Program Penguatan Akuntabilitas, Program Penguatan Pengawasan, dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Implementasi dan *monitoring* serta evaluasi dari masing-masing kegiatan pada program-program tersebut digambarkan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 3. Timeline Penerapan Program Manajemen Perubahan

No.	Indikator	Target Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2020								Capaian		
			Juni				Juli						
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1.	Penyusunan/ Pembentukan Tim Kerja	1. Rapat Penyusunan/Pembentukan Tim Kerja.	X										Tercapai
		2. Melaporkan Hasil Rapat kepada Deputi DKK.	X										Tercapai
		3. Pengusulan Anggota Tim Kerja.	X										Tercapai
		4. Melaporkan kepada Deputi DKK dan Menyampai-kan Rancangan Keputusan Deputi Bidang Administrasi tentang Tim Kerja WBK/WBBM tahun 2020.	X										Tercapai
		5. Pengesahan SK Tim Kerja oleh Deputi Bidang Administrasi.		X									Tercapai
		6. Penomoran SK Tim Kerja.		X									Tercapai
		7. Penyampaian SK Tim Kerja.		X									Tercapai
2.	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan-an Zona Integritas menuju WBK/WBBM.	1. Rapat Penyusunan Rancangan Rencana Kerja.		X									Tercapai
		2. Melaporkan Hasil Rapat kepada Deputi DKK.		X									Tercapai
		3. Penyampaian Rencana Kerja.		X									Tercapai
		4. Sosialisasi Kegiatan Pembangunan-an ZI Menuju WBK/WBBM di Kedepatian DKK.		X									Tercapai
3.	Pemantauan dan Evaluasi	1. Memastikan Pelaksanaan Pembangunan-an ZI Menuju WBK/WBBM di Kedepatian DKK Sudah Sesuai dengan Rencana dan Jadwal Kerja		X									Tercapai

No.	Indikator	Target Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2020								Capaian		
			Juni				Juli						
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
	Pembangun-an Zona Integritas menuju WBK/WBBM	serta Target Penyelesaian dan Anggaran.											
		2. Memastikan Terdapat Monev atas Pelaksanaan Pembangun-an ZI Menuju WBK/WBBM di Kedepatian DKK.		X									Tercapai
		3. Memastikan Hasil Monev atas Pelaksanaan Pembangun-an ZI Menuju WBK/WBBM di Kedepatian DKK telah Ditindaklanjuti.		X									Tercapai
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	1. Memastikan Peran Pimpinan di Lingkungan Kedepatian DKK sebagai <i>Role Model</i> Pembangun-an ZI Menuju WBK/WBBM.		X									Tercapai
		2. Memastikan Agen Perubahan di Lingkungan DKK telah Ditetapkan.		X									Tercapai
		3. Memastikan Budaya Kerja dan Pola Pikir di Lingkungan Kedepatian DKK telah Dibangun.		X									Tercapai
		4. Memastikan Keterlibatan Unsur-unsur pada Unit Kerja dalam Pembangun-an ZI menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kedepatian DKK.		X									Tercapai

Tabel 4 . Timeline Penerapan Program Penataan Tata Laksana

No.	Indikator	Target Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2020								Capaian	
			Juni				Juli					
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	1. Memastikan SOP Kedeputian DKK mengacu pada peta proses bisnis.			X							Tercapai
		2. Memastikan Penerapan SOP.			X							Tercapai
		3. Memastikan Pelaksanaan SOP telah Dievaluasi.			X							Tercapai
2.	E-Office	1. Memastikan Pengukuran Kinerja di Lingkungan Kedeputian DKK Menggunakan TI.			X							Tercapai
		2. Memastikan Operasionalisa-si Manajemen SDM di Lingkungan DKK Menggunakan TI.			X							Tercapai
		3. Memastikan Pemberian Pelayanan Publik di Lingkungan Kedeputian DKK Menggunakan TI.			X							Tercapai
		4. Memastikan Monev terhadap Penggunaan TI untuk Pengukuran Kinerja, Operasionalisa-si Manajemen SDM, dan Pemberian Pelayanan Publik di Lingkungan Kedeputian DKK.			X							Tercapai
3.	Keterbukaan Informasi Publik	1. Memastikan Penerapan Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kedeputian DKK.			X							Tercapai
		2. Memastikan Monev terhadap Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kedeputian DKK.			X							Tercapai

Tabel 5. *Timeline* Penerapan Program Penataan Sistem Manajemen SDM

No.	Indikator	Target Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2020								Capaian			
			Juni				Juli							
			I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1.	Perencana-an Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi.	1. Memastikan Penyusunan Kebutuhan Pegawai mengacu pada Peta Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja untuk Masing-masing Jabatan.			X								Tercapai	
		2. Memastikan Penempatan Pegawai Hasil Rekrutmen Murni Mengacu pada Kebutuhan Pegawai yang Telah Disusun per Jabatan.			X								Tercapai	
		3. Memastikan Monev terhadap Penempatan Pegawai Rekrutmen untuk Memenuhi Kebutuhan Jabatan dalam Organisasi (Perbaikan terhadap Kinerja).			X									Tercapai
2.	Pola Mutasi Internal.	1. Memastikan Dalam Pengembangan Karier Pegawai di Lingkungan Kedeputian DKK telah Dilakukan Mutasi Pegawai antar Jabatan.			X									Tercapai
		2. Memastikan Mutasi Pegawai antar Jabatan telah Memperhatikan Kompetensi Jabatan dan Mengikuti Pola Mutasi yang Telah Ditetapkan.			X									Tercapai
		3. Memastikan Monev terhadap Kegiatan Mutasi yang telah Dilakukan dalam Kaitannya dengan Perbaikan Kinerja.			X									Tercapai
3.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1. Memastikan Dalam Pengembangan Kompetensi telah Dilakukan <i>Training Need Analysis</i> .			X									Tercapai
		2. Memastikan Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai Mempertim-bangkan Hasil Pengelolaan Kinerja Pegawai.			X									Tercapai

No.	Indikator	Target Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2020								Capaian		
			Juni				Juli						
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
		3. Memastikan Persentase Kesenjangan Kompetensi Pegawai yang ada dengan Standar Kompetensi yang Ditetapkan untuk Masing-masing Jabatan.			X								Tercapai
		4. Memastikan Pegawai di Lingkungan Kedepuitan DKK telah Memperoleh Kesempatan/Hak untuk Mengikuti Diklat maupun Pengembangan Kompetensi Lainnya.			X								Tercapai
		5. Memastikan Dalam Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, Kedepuitan DKK telah Melakukan upaya Pengembangan Kompetensi kepada Pegawai (melalui Pengikutsertaan pada Lembaga Pelatihan, <i>in-House Training</i> , atau <i>Coaching</i> , Mentoring, dll).			X								Tercapai
		6. Memastikan Monev terhadap Hasil Pengembangan Kompetensi dalam Kaitannya dengan Perbaikan Kinerja.			X								Tercapai
4.	Penetapan Kinerja Individu	1. Memastikan Penetapan Kinerja (PK) Individu terkait dengan Kinerja di Kedepuitan DKK.			X								Tercapai
		2. Memastikan Ukuran Kinerja Individu telah Sesuai dengan Indikator Kinerja Individu Level Diatasnya.			X								Tercapai
		3. Memastikan Pengukuran Kinerja Individu di Lingkungan Kedepuitan DKK dilakukan secara Periodik.			X								Tercapai
		4. Memastikan Hasil Penilaian Kinerja Individu Dijadikan Dasar untuk Pemberian <i>Reward</i> (Pengembangan Karir Individu, Penghargaan dll).			X								Tercapai
5.	Penegakan Aturan Disiplin/ Kode Etik/Kode Perilaku	Memastikan Pelaksanaan/ Implementasi Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku di Lingkungan Kedepuitan DKK.			X								Tercapai

No.	Indikator	Target Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2020								Capaian			
			Juni				Juli							
			I	II	III	IV	I	II	III	IV				
	Pegawai													
6.	Sistem Informasi Kepegawaian	Memastikan Pemutakhiran Data Informasi Kepegawaian di Lingkungan Kedeputian DKK Dilakukan secara Berkala.				X								Tercapai

Tabel 6. *Timeline* Penerapan Program Penguatan Akuntabilitas

No.	Indikator	Target Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2020								Capaian		
			Juni				Juli						
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1.	Keterlibatan Pimpinan	1. Memastikan Keterlibatan Pimpinan secara langsung dalam Penyusunan Perencanaan.				X							Tercapai
		2. Memastikan Keterlibatan Pimpinan secara langsung dalam Penyusunan Penetapan Kinerja.				X							Tercapai
		3. Memastikan Pimpinan Memantau Pencapaian Kinerja secara Berkala,				X							Tercapai
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Memastikan Terdapat Dokumen Perencanaan di Lingkungan Kedepuitan DKK.				X							Tercapai
		2. Memastikan Dokumen Perencanaan di Lingkungan Kedepuitan DKK telah Berorientasi Hasil.				X							Tercapai
		3. Memastikan Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kedepuitan DKK.				X							Tercapai
		4. Memastikan Indikator Kinerja telah SMART.				X							Tercapai
		5. Memastikan Laporan Kinerja Disusun Tepat Waktu.				X							Tercapai
		6. Memastikan Pelaporan Kinerja telah Memberikan Informasi Kinerja.				X							Tercapai
		7. Memastikan terdapat Upaya Peningkatan Kapasitas SDM yang Menangani Akuntabilitas Kinerja.				X							Tercapai
		8. Memastikan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Dilaksanakan oleh SDM yang				X							Tercapai

No.	Indikator	Target Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2020								Capaian			
			Juni				Juli							
			I	II	III	IV	I	II	III	IV				
		Kompeten.												

Tabel 7. Timeline Penerapan Program Penguatan Pengawasan

No.	Indikator	Target Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2020								Capaian
			Juni				Juli				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.	Pengendalian Gratifikasi	1. Memastikan <i>Public Campaign</i> Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kedepatian DKK telah Dilaksanakan.					X				Tercapai
		2. Memastikan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kedepatian DKK telah Dilaksana-kan/Diimplemen-tasikan.					X				Tercapai
2.	Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	1. Memastikan Lingkungan Pengendalian di Kedepatian DKK telah Dibangun.					X				Tercapai
		2. Memastikan Telah Dilakukan Penilaian Risiko atas Pelaksanaan Kebijakan di Lingkungan Kedepatian DKK.					X				Tercapai
		3. Memastikan Kegiatan Pengendalian untuk Meminimalisir Risiko yang telah Diidentifikasi di Lingkungan Kedepatian DKK telah Dilakukan.					X				Tercapai
		4. Memastikan SPI di Lingkungan Kedepatian DKK telah Diinformasi-kan dan Di-komunikasikan kepada Seluruh Pihak Terkait.					X				Tercapai
3.	Pengaduan Masyarakat	1. Memastikan Kebijakan Pengaduan Masyarakat telah Diimplementasi-kan .					X				Tercapai
		2. Memastikan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat telah Ditindaklanjuti.					X				Tercapai
		3. Memastikan Monev atas Penanganan Pengaduan Masyarakat telah Dilakukan.					X				Tercapai
		4. Memastikan Hasil Monev atas Penanganan Pengaduan Masyarakat telah Ditindaklanjuti					X				Tercapai

No.	Indikator	Target Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2020								Capaian	
			Juni				Juli					
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
4.	Whistle Blowing System	1. Memastikan <i>Whistle Blowing System</i> di Lingkungan Kedepuitan DKK sudah di Internalisasi.					X					Tercapai
		2. Memastikan <i>Whistle Blowing System</i> di Lingkungan Kedepuitan DKK telah Diterapkan.					X					Tercapai
		3. Memastikan Monev atas Penerapan <i>Whistle Blowing System</i> di Lingkungan Kedepuitan DKK telah Dilakukan.					X					Tercapai
		4. Memastikan Hasil Evaluasi atas Penerapan <i>Whistle Blowing System</i> di Lingkungan Kedepuitan DKK telah Ditindak-lanjuti.					X					Tercapai
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	1. Memastikan Telah Terdapat Identifikasi/ Pemetaan Benturan Kepentingan dalam Tugas dan Fungsi di Lingkungan Kedepuitan DKK.					X					Tercapai
		2. Memastikan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kedepuitan DKK telah Disosiali-sasikan/Diinternalisasi.					X					Tercapai
		3. Memastikan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kedepuitan DKK telah Diimplementasi-kan.					X					Tercapai
		4. Memastikan Telah dilakukan Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kedepuitan DKK.					X					Tercapai
		5. Memastikan Hasil Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kedepuitan DKK telah Ditindaklanjuti.					X					Tercapai
6.	Penyampaian Laporan Harta	1. Memastikan Telah dilaporkannya Laporan Harta Kekayaan Pegawai (LHKPN)					X					Tercapai

No.	Indikator	Target Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2020								Capaian			
			Juni				Juli							
			I	II	III	IV	I	II	III	IV				
	Kekayaan Pegawai	di Lingkungan Kedepuitian DKK.												
		2. Memastikan Telah dilaporkannya Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Kedepuitian DKK.						X						Tercapai

Tabel 8. Timeline Penerapan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No.	Indikator	Target Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2020								Capaian
			Juni				Juli				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.	Standar Pelayanan	1. Memastikan Terdapat Kebijakan Standar Pelayanan di Lingkungan Kedepuitan DKK.						X			Tercapai
		2. Memastikan Standar Pelayanan di Lingkungan Kedepuitan DKK.telah Dimaklumkan.						X			Tercapai
		3. Memastikan Terdapat SOP bagi Pelaksanaan Standar Pelayanan di Lingkungan Kedepuitan DKK.						X			Tercapai
		4. Memastikan Telah Dilakukan Reviu dan Perbaikan atas Standar Pelayanan dan SOP di Lingkungan Kedepuitan DKK.						X			Tercapai
2.	Budaya Pelayanan Prima	1. Memastikan Telah Dilakukan Sosialisasi/ Pelatihan Dalam Upaya Penerapan Budaya Pelayanan Prima di Lingkungan Kedepuitan DKK.						X			Tercapai
		2. Memastikan Informasi tentang Pelayanan di Lingkungan Kedepuitan DKK Mudah Diakses melalui Berbagai Media.						X			Tercapai
		3. Memastikan telah terdapat Sistem <i>Punishment</i> (Sanksi)/ <i>Reward</i> bagi Pelaksana Layanan serta Pemberian Kompensasi kepada Penerima Layanan di Lingkungan Kedepuitan DKK.						X			Tercapai
		4. Memastikan Terdapat Sarana Layanan Terpadu/ Terintegrasi di Lingkungan Kedepuitan DKK.						X			Tercapai
		5. Memastikan Terdapat Inovasi Pelayanan di Lingkungan Kedepuitan DKK.						X			Tercapai
3.	Penilaian Kepuasan	1. Memastikan Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Lingkungan						X			Tercapai

No.	Indikator	Target Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2020								Capaian	
			Juni				Juli					
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
	Terhadap Pelayanan	Kedeputian DKK.										
		2. Memastikan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kedeputian DKK Dapat Diakses secara Terbuka.							X			Tercapai
		3. Memastikan Dilakukan Tindak Lanjut atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kedeputian DKK.							X			Tercapai

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan.

1. Sekretariat Kabinet telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tanggal 29 Maret 2016 yang ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Sekretaris Kabinet bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Ombudsman, dan Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet melakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pertama pada tahun 2018. Pada tahun 2020, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet melakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM kembali. Pada tanggal 19 Februari 2020 telah ditetapkan satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet setingkat eselon I yang diusulkan sebagai unit kerja WBK/WBBM yakni Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Penetapan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebagai calon WBK/WBBM tersebut dengan memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam Permenpan-RB No.10/2019 jo. Permenpan-RB No.52/2014, yakni Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet telah mengelola sumber daya yang cukup besar; dan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi.
3. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2020 dengan membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2020 yang ditugaskan dengan Keputusan Deputi Bidang Administrasi tentang Tim kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2020. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet difokuskan pada penerapan program-program dalam Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkret, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.10 Tahun 2019 *juncto*. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Permenpan-RB No.10/2019 jo. Permenpan-RB No.52/2014).

3.2 Saran.

Dalam rangka membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2020, beberapa hal yang masih perlu diperbaiki adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai berdasarkan pada gap kompetensi serta menyusun rencana pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan penerapan pelaksanaan sistem pengaduan masyarakat, penanganan benturan, dan layanan publik yang lebih optimal.
3. Menciptakan inovasi-inovasi dalam rangka pelayanan publik.
4. Menerapkan pelayanan berbasis teknologi informasi melalui pengembangan *e-government* dan melakukan sosialisasi.